TRIBUN PONTIANAK

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2023 | Hal.: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kejar Target PAD Capai Rp 700 M

Wako Susun Perwa Pembentukan Dispenda

PONTIANAK, TRIBUN - Proses Pemisahan Badan Keuangan Daerah (BKD) dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak kini masih berjalan. Saat ini masih proses penyusunan Perwa tentang pembentukan Dispenda tersebut. Pembentukan Dispenda tersebut rencananya akan selesai pada akhir tahun 2023 ini.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, tujuan dibentuknya Dispenda tersebut untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Menurutnya, Perda tentang pemecahan BKD dan Dispenda tersebut sudah ada. Hanya saja tinggal menunggu Perwa yang saat ini sedang disusun.

"Pembentukan Dispenda yang sudah ada Perdanya bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Pendapatan Daerah untuk pembangunan dan peningkatan capaian visi misi Kota Pontianak," ujarnya.

Ia berharap dengan adanya pemecahan BKD dan Dispenda ini dapat meningkatkan PAD Kota Pontianak. Ia menyebut, bahwa pada tahun 2022 lalu PAD Kota Pontianak mencapai Rp 536 miliar dan ditargetkan pada tahun 2023 ini bisa mencapai Rp 700 miliar.

Tentu capaian tersebut bukan tidak mungkin jika dua instansi bisa bekerja dengan maksimal. Dispenda bertugas untuk menggait pendapatan. Sedangkan BKD fokus pada keuangan daerah Kota Pontianak.

> **Pembentukan Dispenda yang sudah ada Perdanya bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Pendapatan Daerah untuk pembangunan dan peningkatan capaian visi misi Kota Pontianak**
>
> **Edi Rusdi Kamtono**
> Wali Kota Pontianak

Usulan DPRD

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak akan dilakukan pemecahan dengan Dinas Pendapatan Daerah (DPD) Kota Pontianak Kalimantan Barat. Sebagaimana yang telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Ketua Komisi III DPRD Kota Pontianak Mujiono menyampaikan, bahwa Perda terkait dengan pemecahan Dinas Pendapatan Daerah dan BKD ini sudah evaluasi oleh Gubernur Kalbar dan saat ini hanya tinggal menunggu Peraturan Walikota (Perwa) saja.

"Diharapkan pertengahan tahun 2023 ini sudah selesai terkait dengan pemisahan Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan Daerah," ujarnya, kemarin.

Mujiono juga menjelaskan tentang alasan pemecahan Dinas Pendapatan Daerah dan BKD tersebut. Alasan pertama lanjutnya adalah berkaitan dengan beban kerja.

Selama ini, ia menilai bahwa BKD Kota Pontianak bekerja dengan dua fungsi yaitu berkaitan dengan pendapatan dan keuangan. "Sehingga ketika dipecah, maka BKD nanti akan fokus pada bidang keuangan sementara untuk Dinas Pendapatan

■ Bersambung ke hal. 10

TRIBUN PONTIANAK

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2023 | Hal.: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kejar Target PAD Capai Rp 700 M

Sambungan Hal.9

Daerah fokus pada pendapatan," terangnya.

Selain alasan pertama itu, Mujiono juga menyebutkan alasan kedua pemecahan tersebut adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pontianak sehingga bisa maksimal.

Walaupun dinilainya capaian PAD Kota Pontianak pada tahun 2022 cukup tinggi. Namun target pada tahun 2023 ini ditargetkan Rp700 miliar harus tercapai.

"Alhamdulillah PAD tahun 2022 ini PAD kota Pontianak tertinggi selama masa berdirinya Kota Pontianak yaitu Rp 536 miliar. Tetapi di tahun 2023 ditargetkan harus mencapai Rp 700 miliar," terangnya.

Untuk itu, demi tercapainya target tersebut. Pihaknya menekankan kepada BKD untuk melakukan beberapa langkah salah satunya ialah percepatan validasi PBB yang saat ini baru 3.000 objek yang divalidasi dari 124 ribu.

Hal ini dikarenakan PBB ini primadona pajak di Kota Pontianak. Kemudian yang kedua pihaknya juga meminta kepada BKD untuk percepatan penyelesaian Perda pajak retribusi, ini mengacu pada UU nomor 1 tahun 2022.

"Kita minta dipertengahan tahun sudah disahkan, karena disitu ada penyesuaian dengan tarif pajak dan objek pajak," imbuhnya.

Ketiga, pihaknya berharap dalam peningkatan PAD ini, maka BKD harus berupaya mencari potensi pajak seperti misalnya pajak hiburan, rekalme, restoran, hotel yang memiliki potensi besar namun pencapaian belum maksimal.

"Tiga hal itu yang kita dorong untuk mencapai target PAD Rp700 miliar di tahun 2023," pungkasnya. **(oki)**